JURNAL PENDIDIKAN IPS
https://doi.org/10.37630/jpi.v15i4.3575
Vol.15 No.4, Desember 2025 | ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141

Efektivitas *Awik-Awik Gubuk* dalam Mencegah Terjadinya Perilaku Menyimpang (Studi Kasus pada Masyarakat Dusun Nyangget, Lombok Tengah)

Usmayadi[1),*], M. Mabrur Haslan[1)], M. Samsul Hadi[1)]

[1)]Universitas Mataram

*Correspondence: usmayadi2003@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas *Awik-Awik Gubuk* dalam mencegah terjadinya perilaku menyimpang di Dusun Nyangget serta proses penyelesaian kasus perilaku menyimpang menurut *awik-awik gubuk* di Dusun Nyangget. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian terdiri dari Kepala Dusun, BKD (Badan Keamanan Desa) dan Tokoh Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Awik-Awik Gubuk* di Dusun Nyangget memiliki nilai historis dan filosofis yang penting sebagai aturan adat yang diwariskan secara turun temurun. Namun dalam implementasinya awik-awik gubuk di Dusun Nyangget masih belum optimal dalam mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain *awik-awik gubuk* belum ditulis secara spesifik, lemahnya penegakan sanksi yang diberikan kepada pelaku, dan kurangnya sosialisasi dari pihak terkait. Adapun dalam proses penyelesaian kasus perilaku menyimpang menurut *awik-awik gubuk* di Dusun Nyangget terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap pelaporan kasus, pemanggilan pelaku, musyawarah Dusun, dan pemberian sanksi kepada pelaku. Dengan demikian, *awik-awik gubuk* di Dusun Nyangget masih memiliki peran penting sebagai instrumen hukum adat, meskipun dalam penerapannya perlu ada penguatan pada aspek penegakan sanksi, legalitas tertulis, serta intensitas sosialisasi agar lebih efektif dalam mencegah terjadinya perilaku menyimpang.

Kata Kunci: *Awik-Awik Gubuk*; Hukum Adat; Perilaku Menyimpang

This is an open access article under the CC - BY license.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Artinya, seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berlandaskan pada hukum yang berlaku (Hudori et al., 2019). Lebih lanjut Nurhadianto (Hamzani & Mukhidin, 2022) menyatakan dalam sistem hukum Indonesia, dikenal dua bentuk hukum, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis bersumber dari peraturan perundang-undangan yang bersifat formal dan menjamin kepastian hukum, sedangkan hukum tidak tertulis atau *living law* merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk hukum tidak tertulis yang masih eksis hingga kini adalah hukum adat, yang berfungsi sebagai pedoman moral dan pengendali perilaku sosial masyarakat.

Hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang bersumber dari aturan-aturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat. karena aturan-aturannya tidak tertulis dan tumbuh kembang, hukum adat mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dan elastis (Siregar, 2018). Di beberapa daerah di Indonesia, hukum adat dikenal dengan istilah *awik-awik*. Menurut Irrubai et al., (2017) *awik-awik* berasal dari kata a artinya tidak dan *wig* yang artinya rusak sedangkan *awig* artinya tidak rusak atau baik, jadi *awik-awik* artinya sesuatu yang menjadi baik, tidak merusak dan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera. Konsepsi inilah yang dituangkan dalam aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, sehingga menciptakan suatu pengertian bahwa *awik-awik* adalah peraturan-peraturan hidup krama

ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141
https://doi.org/10.37630/jpi.v15i4.3575

desa di desa adatnya, untuk menciptakan kehidupan yang aman, tentram, tertib dan sejahtera. *Awik-awik* merupakan keseluruhan hukum yang mengatur tata kehidupan warga desa adat beserta sanksi dan aturan pelaksanaannya (Fitriani et al., 2024).

Terdapat berbagai macam *awik-awik* yang ada di masyarakat di antaranya, yaitu *awik-awik* yang berhubungan dengan keamanan, ketertiban, melanggar kesopanan, kesusilaan dan *awik-awik* yang berkaitan dengan tanah adat. Irrubai et al., (2017) menjelaskan bahwa fungsi dibuatnya *awik-awik*, yaitu untuk mengatur dan mengendalikan perilaku warga masyarakat dalam pergaulan hidupnya guna menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi dapat dipahami bahwa *awik-awik* berfungsi mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam mengendalikan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan nilai dan norma adat setempat. Perilaku menyimpang yaitu tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem tata sosial masyarakat. Hisyam (2021) Mendefinisikan bahwa perilaku menyimpang merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang secara sadar atau tidak sadar yang bertentangan dengan norma atau aturan yang sudah disepakati bersama, yang menimbulkan korban maupun tidak menimbulkan korban. Lebih lanjut perilaku menyimpang yang menimbulkan korban dapat dikategorikan sebagai kejahatan, pelanggaran dan kenakalan, sedangkan perilaku menyimpang yang tidak menimbulkan korban disebut penyimpangan dan korbannya adalah diri sendiri.

Di sisi lain, perilaku menyimpang merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih sering terjadi di Indonesia. Fenomena ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara tindakan individu atau kelompok dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Menurut Hisyam (2021) bahwa faktor penyebab perilaku menyimpang di Indonesia, bisa dilihat dari dua faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan inteligensi atau tingkat kecerdasan, usia, jenis kelamin, serta kedudukan seseorang dalam keluarga. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kondisi kehidupan rumah tangga atau keluarga, pendidikan di sekolah, lingkungan pergaulan, serta pengaruh media massa. Sebagai contoh, seorang anak yang sering menyaksikan pertengkaran antara orang tuanya dapat melarikan diri pada penyalahgunaan obat-obatan atau narkotika. Selain itu, pengaruh eksternal juga dapat muncul melalui pergaulan individu dengan teman sebaya, serta paparan dari media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Dengan demikian, bentuk-bentuk perilaku menyimpang dapat muncul dalam berbagai wujud, seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, hingga perzinaan. Semua bentuk perilaku tersebut berpotensi mengganggu ketertiban sosial dan merusak tatanan nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat di berbagai daerah memiliki cara dan mekanisme tersendiri dalam menanggulangi perilaku menyimpang tersebut, salah satunya melalui penerapan *awik-awik* sebagai aturan adat yang mengatur kehidupan sosial.

Dusun Nyangget menjadi salah satu Dusun yang mempunyai *awik-awik gubuk* yang melarang keras segala bentuk perilaku menyimpang. Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan pada hari Minggu 2 Februari dan Senin 3 Februari 2025 di Dusun Nyangget, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. *Awik-awik gubuk* di Dusun Nyangget ini dibuat guna mencegah terjadinya perilaku menyimpang dalam masyarakat, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat diharapkan dapat tercipta lingkungan yang sehat dan terjaga, sehingga dapat mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Namun demikian dalam pelaksanaannya *awik-awik gubuk* di Dusun Nyangget ini dinilai masih kurang tegas dan efektif, karena masih saja ada perilaku menyimpang yang terjadi. Salah satu contohnya adalah kasus pelanggaran norma kesusilaan yang sempat terjadi pada tahun 2023, yang melibatkan warga setempat. Ini merupakan masalah yang harus diselesaikan guna mencapai apa tujuan awal dibentuknya *awik-awik gubuk* di Dusun Nyangget. Sistem hukum yang berjalan dengan baik adalah kunci utama agar hukum efektif dalam mengatur masyarakat dan mencapai tujuannya. Menurut Soejono Soekanto (Yusuf, 2022) keberhasilan atau efektifnya suatu hukum ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu: pertama faktor hukum itu sendiri, kedua faktor penegakan hukum, ketiga faktor fasilitas penegakan hukum, keempat faktor masyarakat, kelima faktor kebudayaan. teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto digunakan peneliti sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana *awik-awik* gubuk di Dusun Nyangget berfungsi efektif dalam mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, artikel ini mengangkat dua fokus utama yaitu, 1). Bagaimana efektivitas *Awik-Awik Gubuk* dalam mencegah terjadinya perilaku menyimpang di Dusun Nyangget, Desa Sepakek, Kab. Lombok Tengah?, dan 2). Bagaimana proses penyelesaian kasus perilaku menyimpang menurut *Awik-Awik Gubuk* di Dusun Nyangget, Desa Sepakek, Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah?

ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141
https://doi.org/10.37630/jpi.v15i4.3575

METODE

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono, (2018) metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang mendalam dan komprehensif untuk memahami dan menjelaskan fenomena dalam konteks alamiahnya. Pendekatan kualitatif menekankan pada interpretasi, pemahaman konteks, dan makna subjektif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti terlibat secara langsung dengan subjek penelitiannya untuk mendapatkan wawasan yang mendalam mengenai berbagai aspek kehidupan manusia, sosial, atau budaya. Metode ini memberikan ruang bagi kompleksitas dan konteks yang tidak selalu dapat diukur dalam angka, memungkinkan peneliti untuk menjelajahi dimensi yang lebih luas dari realitas sosial. Singkatnya peneliti memilih pendekatan kualitatif karena ingin mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial terkait efektivitas *Awik-Awik gubuk* dalam mencegah terjadinya perilaku menyimpang di Dusun Nyangget.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus. Metode studi kasus kualitatif digunakan peneliti karena dianggap paling sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu memahami secara mendalam efektivitas *Awik-Awik Gubuk* dalam mencegah terjadinya perilaku menyimpang di Dusun Nyangget. Berbeda dengan metode kuantitatif yang berfokus pada pengukuran dan generalisasi data numerik. Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana *Awik-Awik Gubuk* diterapkan, bagaimana masyarakat memaknai aturan tersebut, serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitasnya. Menurut Ilhami, (2024) menjelaskan bahwa studi kasus memiliki karakteristik dalam pertanyaan penelitian yang diawali dengan kata "*how*" or "*why*." Pertanyaan penelitian yang memakai case study akan berfokus pada sejumlah kejadian yang sedang diteliti dan mencari hubungannya. Penelitian studi kasus (case study) adalah salah satu bentuk penelitian kualitatif yang berbasis mengenai kejadian atau situasi pemahaman dan perilaku manusia berdasarkan pada opini manusia. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi suatu peristiwa yang terjadi dengan mengumpulkan data dari lapangan, sehingga menghasilkan gambaran yang detail dan menyeluruh tentang kasus terkait efektivitas *Awik-Awik gubuk* dalam mencegah terjadinya perilaku menyimpang di Dusun Nyangget. Penelitian ini bertempat di Dusun Nyangget Desa Sepakek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah. Waktu penelitian di laksanakan dari Selasa 10 Juni sampai Selasa 1 Juli tahun 2025.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti itu sendiri. Data primer didapatkan melalui wawancara bersama informan dan observasi. Data primer dijadikan sebagai objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data terkait penelitian (Rejeki et al., 2020) Adapun data skunder dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen (Gantara & Anshori, 2022). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel-artikel, literatur-literatur dan lainnya yang menjelaskan dan berkaitan dengan penelitian.

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Subjek penelitian adalah yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti (Suriani et al., 2023). Subjek dalam penelitian ini adalah Ketua Remaja, Ketua jama'ah Serakalan dan masyarakat di Dusun Nyangget yang mengetahui bagaimana penerapan *awik-awik gubuk* di Dusun Nyangget. Menurut Moleong (Iskandar & Hamdani, 2017) informan penelitian merupakan individu yang dijadikan sumber untuk memberikan keterangan mengenai situasi serta kondisi lingkungan penelitian. Oleh karena itu, informan perlu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai terkait objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan arah dan tujuan penelitian (Maharani & Bernard, 2018). Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dusun Nyangget, mantan Kepala Dusun Nyangget dan Badan Keamanan Desa (BKD).

Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik observasi Menurut (sugiyono, 2018) observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek atau perilaku, sedangkan Gagah & Sopiati, (2024) menambahkan bahwa observasi membantu memahami perilaku subjek dalam konteks sosialnya. Penelitian ini menggunakan observasi partisipan agar peneliti dapat terlibat langsung dengan masyarakat Dusun Nyangget untuk memahami penerapan *awik-awik gubuk*. Teknik wawancara dilakukan secara semi terstruktur guna menggali informasi secara mendalam dengan fleksibilitas pertanyaan (sugiyono, 2018) Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data

ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141
https://doi.org/10.37630/jpi.v15i4.3575

dari berbagai sumber tertulis seperti arsip, laporan, dan foto guna mendukung keakuratan hasil penelitian (sugiyono, 2018).

Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Kurniatama, (2019) reduksi data merupakan proses menajamkan dan mengelompokkan data dengan memfokuskan pada hal-hal penting agar lebih mudah dipahami. Setelah itu, data disajikan dalam bentuk uraian atau visual seperti bagan dan matriks untuk mempermudah penafsiran (sugiyono, 2018). Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu menafsirkan dan menganalisis data guna menemukan keterkaitan dan makna mendalam dari hasil penelitian (Putri et al., 2021) Dalam penelitian ini, ketiga tahap tersebut diterapkan untuk menganalisis data mengenai efektivitas *Awik-Awik Gubuk* dalam mencegah perilaku menyimpang di Dusun Nyangget.

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode triangulasi untuk memastikan keakuratan dan keandalan data. Menurut Prabowo & Heriyanto, (2013) triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu di luar data utama sebagai pembanding. Penelitian ini menggunakan tiga jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber, dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber dan dokumen untuk menilai konsistensi data; triangulasi teknik, dengan memadukan wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh data yang lebih akurat; serta triangulasi waktu, dengan mengumpulkan data pada waktu yang berbeda untuk menguji kestabilan dan konsistensi hasil penelitian terkait efektivitas *Awik-Awik Gubuk* dalam mencegah perilaku menyimpang di Dusun Nyangget.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikumpulkan dan dijelaskan oleh peneliti, diperoleh temuan mengenai efektivitas *Awik-Awik Gubuk* dalam mencegah perilaku menyimpang serta proses penyelesaian kasus pelanggaran adat di Dusun Nyangget. Seluruh data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setelah proses analisis dilakukan, hasil penelitian tersebut dibahas secara mendalam untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan dan fungsi *Awik-Awik Gubuk* dalam kehidupan sosial masyarakat Dusun Nyangget. Berikut adalah pemaparan hasil dan pembahasan penelitian.

Efektivitas *Awik-Awik* Gubuk Dalam Mencegah Terjadinya Perilaku Menyimpang Di Dusun Nyangget

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh di Dusun Nyangget, *Awik-Awik Gubuk* merupakan salah satu bentuk hukum adat yang masih hidup dan dijadikan pedoman dalam menjaga ketertiban sosial masyarakat. Aturan adat ini berfungsi sebagai pengendali perilaku warga agar tetap selaras dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungan setempat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan *Awik-Awik Gubuk* dalam mencegah perilaku menyimpang belum berjalan secara optimal. Meskipun masyarakat masih menghormati keberadaannya, kenyataannya masih ditemukan berbagai pelanggaran seperti kasus perzinaan dan kehamilan di luar nikah.

Menurut Ahadi, (2022) efektivitas hukum diukur dari sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan hasil yang diharapkan. Dalam konteks ini, keberadaan *Awik-Awik Gubuk* belum sepenuhnya mampu mencapai tujuannya sebagai instrumen pengendalian sosial. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi tingkat efektivitasnya di tengah masyarakat. Menurut teori Soerjono Soekanto (Yusuf, 2022) efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Sementara Ahadi, (2022) menjelaskan bahwa suatu hukum akan efektif jika berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Berdasarkan analisis, terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi efektivitas *Awik-Awik Gubuk*, yaitu isi aturan yang belum jelas, lemahnya penegakan sanksi, dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat.

Awik-Awik Gubuk

Di Dusun Nyangget *Awik-Awik Gubuk* masih diwariskan secara lisan tanpa bentuk tertulis yang pasti. Hal ini menyebabkan perbedaan tafsir dan ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi. Menurut Ahadi, (2022) menjelaskan ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu hukum, salah satunya yaitu faktor hukum itu sendiri yang dalam teori hukum dapat dibedakan tiga hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yakni kaidah hukum berlaku secara yuridis, kaidah hukum berlaku secara sosiologis, dan kaidah hukum berlaku

ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141
https://doi.org/10.37630/jpi.v15i4.3575

secara filosofis. Berdasarkan ketiga hal tersebut, maka agar hukum tersebut dapat berfungsi setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga komponen tersebut. a) Yuridis, Dari segi yuridis, sebuah aturan dapat dikatakan efektif apabila memiliki dasar hukum yang jelas dan dituangkan dalam bentuk tertulis agar dapat dipahami, diakses, dan dijadikan pedoman bersama. Dalam konteks *awik-awik gubuk* di Dusun Nyangget, aturan yang berlaku masih bersifat lisan dan diwariskan secara turun-temurun. b) Sosiologis, dari segi sosiologis, hukum atau aturan akan efektif apabila ditaati oleh masyarakat karena sesuai dengan kebutuhan sosial dan realitas kehidupan mereka. *Awik-awik gubuk* di Dusun Nyangget memang diakui keberadaanya sebagi warisan nenek moyang, namun, karena tidak dirumuskan secara rinci, terutama mengenai jenis pelanggaran dan bentuk sanksi, aturan tersebut tidak sepenuhnya ditaati oleh generasi muda. Banyak anak muda yang bahkan tidak mengetahui isi dari *awik-awik* tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara sosiologis, *awik-awik* belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan sosial masyarakat saat ini. c) Filosofis, dari segi filosofis hukum harus selaras dengan nilai-nilai keadilan dan tujuan hidup bersama dalam masyarakat. *Awik-awik gubuk* di Dusun Nyangget pada dasarnya memiliki tujuan mulia untuk menjaga keharmonisan dan ketertiban sosial dalam suatu wadah yaitu *gubuk* atau Dusun. Namun, karena tidak dirumuskan secara jelas, tujuan tersebut sering kali tidak tercapai. Misalnya, dalam penyelesaian kasus pelanggaran, pemberian sanksi sering dilakukan secara tergesa-gesa tanpa adanya landasan aturan yang pasti, sehingga menimbulkan kesan tidak adil di tengah masyarakat

Lemahnya Penegakan Sanksi

Sanksi merupakan suatu konsekuensi hukum yang diberikan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap norma atau peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Putra, (2018:30) menjelaskan bahwa Sanksi merupakan bentuk penderitaan, kerugian beban berat yang sengaja diciptakan oleh lembaga sosial untuk memaksa anggota masyarakat agar taat pada norma yang ada. Efektivitas dari peranan kontrol sosial akan sangat tergantung pada efektivitas kekuatan sanksi yang dijatuhkan pada para pelanggar. Di Dusun Nyangget sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran sering kali dinilai terlalu ringan dan cenderung tidak memberikan efek jera. Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum menurut Ahadi, (2022) salah satu faktor penting yang menentukan efektivitas hukum atau keberhasilan suatu hukum adalah faktor penegak hukum. Dalam konteks *awik-awik gubuk*, pihak yang berperan sebagai penegak hukum adat adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat maupun BKD (Badan Keamanan Desa) yang terlibat dalam musyawarah penjatuhan sanksi. Lemahnya sikap tegas dari para penegak hukum adat ini menyebabkan *awik-awik gubuk* kehilangan wibawanya di tengah masyarakat di Dusun Nyangget. Penegakan hukum yang seharusnya memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan justru berubah menjadi sebatas formalitas.

Kurangnya Sosialisasi

Faktor ketiga yang memengaruhi rendahnya efektivitas adalah kurangnya sosialisasi. Sosialisasi adalah salah satu sarana yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Sosialisasi biasa disebut teori mengenai peranan, karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh masing-masing individu (Murtani, 2019). Sementara menurut Nurdianti, (2014) menjelaskan sosialisasi dapat diartikan sebagai proses dimana masyarakat di didik untuk mengenal, memahami, mentaati, menghargai norma-norma nilai yang berlaku didalam Masyarakat. Kondisi yang terjadi di Dusun Nyangget menunjukkan bahwa proses penyampaian *awik-awik* masih sangat terbatas. Aturan-aturan yang berlaku di dalam *Gubuk* atau Dusun cenderung hanya diketahui oleh sebagian masyarakat yang lebih tua, sedangkan generasi muda belum banyak memperoleh pengetahuan mengenai isi dan substansi *awik-awik*. Kurangnya sosialisasi *Awik-awik gubuk* ini semakin memperlemah posisi *awik-awik* sebagai instrumen pengendalian sosial, karena aturan yang tidak disosialisasikan dengan baik akan sulit untuk dipatuhi. Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum menurut Ahadi, (2022) peran penegak hukum tidak hanya sebatas menjatuhkan sanksi ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat memahami aturan hukum yang berlaku.

Meskipun penerapan *Awik-Awik Gubuk* di Dusun Nyangget belum sepenuhnya efektif dalam mencegah terjadinya perilaku menyimpang, keberadaannya tetap memiliki peran penting sebagai pedoman sosial yang dijadikan dasar dalam penyelesaian berbagai pelanggaran adat. Nilai-nilai yang terkandung dalam *Awik-Awik Gubuk* masih dijunjung tinggi oleh masyarakat sebagai wujud kearifan lokal yang menekankan keadilan, kebersamaan, dan keharmonisan sosial. Oleh karena itu, selain meninjau tingkat efektivitasnya, penting pula untuk memahami bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran dilakukan melalui sistem hukum adat ini.

ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141
https://doi.org/10.37630/jpi.v15i4.3575

Proses Penyelesaian Kasus Perilaku Menyimpang Menurut Awik-Awik Gubuk di Dusun Nyangget

Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian pelanggaran *Awik-Awik Gubuk* di Dusun Nyangget dilakukan melalui mekanisme adat yang mencerminkan nilai musyawarah dan keadilan sosial. Proses ini terdiri atas empat tahapan utama, yaitu pelaporan kasus, pemanggilan pelaku, musyawarah dusun, dan pemberian sanksi, di mana seluruh tahapan dijalankan secara berjenjang oleh kepala dusun, BKD, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk menjaga legitimasi hukum adat serta keharmonisan sosial masyarakat.

Pelaporan Kasus

Tahap awal dimulai dengan pelaporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran adat, seperti perzinaan atau kehamilan di luar nikah. Menurut Kamaruddin, (2013) pelaporan merupakan langkah pertama dalam penyelesaian adat, di mana pihak pelapor menyampaikan persoalan kepada lembaga adat agar difasilitasi melalui mediasi atau musyawarah. Di Dusun Nyangget, laporan disampaikan kepada kepala dusun atau *BKD* (Badan Keamanan Desa) disertai bukti dan saksi untuk menghindari tuduhan sepihak. Jika pelaku tertangkap basah, ia langsung diamankan ke rumah kepala dusun, sedangkan jika melarikan diri, laporan tetap diproses melalui bukti dan kesaksian. Mekanisme pelaporan ini menjadi sarana pengawasan sosial dan mencegah tindakan main hakim sendiri, serta memperlihatkan struktur hukum adat yang terorganisir dari masyarakat hingga aparat dusun.

Pemanggilan Pelaku

Tahap berikutnya adalah pemanggilan pelaku dan pihak terkait untuk klarifikasi kasus. Menurut Diras & Faisal, (2024) pemanggilan bertujuan menelusuri duduk perkara melalui pemeriksaan terhadap pelaku dan saksi. Di Dusun Nyangget, proses ini dilakukan oleh kepala dusun dengan didampingi BKD dan tokoh masyarakat secara terbuka dan beretika. Pemeriksaan dilakukan di rumah kepala dusun, dengan menghadirkan bukti dan saksi guna memastikan kebenaran laporan. Kadang pelaku dipanggil secara terpisah untuk menghindari tekanan antar pihak. Jika pelaku menolak hadir, aparat adat akan mendatanginya secara langsung. Tahap ini menunjukkan prinsip kehati-hatian dan keadilan dalam mekanisme adat, karena setiap laporan diverifikasi terlebih dahulu sebelum diputuskan dalam musyawarah.

Musyawarah Dusun

Tahap selanjutnya adalah musyawarah dusun, yang menjadi forum utama penyelesaian perkara adat. Menurut Pratiwi & Sunarso, (2018) musyawarah mufakat dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa menimbulkan perpecahan. Di Dusun Nyangget, musyawarah dihadiri oleh kepala dusun, BKD, tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat, biasanya dilaksanakan di masjid sebagai tempat yang netral dan religius. Dalam forum ini, pelaku wajib hadir untuk memberikan klarifikasi dan menerima keputusan bersama. Bentuk sanksi yang dibahas bervariasi, seperti pengasingan, dedosan (denda adat), atau kewajiban sosial lainnya, disesuaikan dengan tingkat pelanggaran. Musyawarah ini menegaskan nilai kolektivitas dan partisipasi masyarakat dalam menjaga norma sosial.

Pemberian Sanksi

Tahap terakhir adalah pemberian sanksi sebagai hasil keputusan musyawarah. Menurut Bupu et al., (2023) sanksi adat terbagi menjadi dua, yaitu materiil, berupa denda atau ganti rugi, dan immateril, seperti pengasingan atau hukuman sosial. Di Dusun Nyangget, sanksi paling umum untuk pelanggaran berat seperti perzinaan adalah pengeluaran dari dusun selama dua hingga lima tahun, disesuaikan dengan tingkat kesalahan. Bentuk lain adalah *Dedosan*, yaitu denda adat yang hasilnya digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan atau jembatan.

Meskipun tegas, pelaksanaan sanksi tetap menjunjung nilai kemanusiaan. Pelaku diberi waktu untuk mempersiapkan diri sebelum meninggalkan dusun dan diperbolehkan kembali dalam kondisi tertentu, misalnya untuk menghadiri pemakaman keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian sanksi tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memiliki nilai edukatif dan sosial. Dengan demikian, sistem sanksi adat di Dusun Nyangget berfungsi sebagai alat kontrol sosial, sarana pembelajaran moral, sekaligus bentuk solidaritas masyarakat dalam menjaga ketertiban bersama.

ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141
https://doi.org/10.37630/jpi.v15i4.3575

KESIMPULAN

Hasil dari temuan penelitian ini memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut; 1). *Awik-Awik Gubuk* di Dusun Nyangget memiliki peran penting sebagai instrumen pengendali sosial dalam menjaga norma dan moral masyarakat, namun efektivitasnya masih belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya pelanggaran seperti perzinaan dan kehamilan di luar nikah, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan *awik-awik* belum sepenuhnya mampu menekan perilaku menyimpang di lapangan. Faktor yang mempengaruhi lemahnya efektivitas ini antara lain: kurangnya sosialisasi *awik-awik* kepada masyarakat, lemahnya penegakan sanksi, serta tidak adanya ketentuan tertulis yang mengatur secara rinci pelaksanaan aturan. 2). Proses penyelesaian kasus pelanggaran terhadap awik-awik dilakukan secara adat melalui empat tahapan utama, yakni pelaporan kasus, pemanggilan pelaku, musyawarah dusun, dan pemberian sanksi. Proses ini menekankan pada asas kekeluargaan, keadilan, dan keseimbangan sosial. Bentuk sanksi yang diberikan bersifat sosial dan edukatif, seperti pengeluaran sementara dari dusun atau denda (dedosan) yang hasilnya digunakan untuk kepentingan umum. Dengan demikian, *Awik-Awik Gubuk* tetap memiliki nilai strategis sebagai pedoman sosial dan moral masyarakat, meskipun perlu penguatan dalam aspek penegakan, dokumentasi aturan, dan pelibatan aktif masyarakat agar efektivitasnya dapat meningkat secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum. *Jurnal Usm Law Review*, *5*(1), 110–127.

Bupu, E. M., Hedewata, A., & Mauritsius, D. (2023). Pemberian Sanksi Dalam Perceraian Adat di Desa Inerie, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, *3*(02), 476–485.

Diras, M. H., & Faisal. (2024). Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pengadilan Adat di Kota Lhokseumawe Diras [1] , Muhammad Hatta [2] & Faisal [3]. *CENDIKIA: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, *2*(3), 688–701.

Fitriani, F., Sumardi, L., Kurniawansyah, E., & Sawaludin, S. (2024). Ethnocivic: Eksplorasi Potensi Kearifan Lokal Sasak Sebagai Sumber Belajar PPKn SMA Kelas XI dalam Upaya Penguatan Karakter Peserta Didik. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, *9*(2), 794–801.

Daruhadi, G., & Sopiati, P. (2024). Pengumpulan Data Penelitian. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, *3*(5), 5423-5443.

Gantara, F., & Anshori, A. R. (2022). Analisis Upah Amil Zakat di BAZNAS Kota Bandung menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, *13*, 99–104.

Hamzani, D. A. I., & Mukhidin, D. (2022). Urgensi Percepatan Pembangunan Hukum Nasional. In *Educacao e Sociedade*. PT Nasya Expanding Management.

Hisyam, D. hj. J. (2021). *perilaku menyimpang tinjauan sosiologis*. PT Bumi Aksara.

Hudori, A., Dahlan, D., & Haslan, M. M. (2019). Kesadaran Hukum Masyarkat Terhadap Kepemilikan E-Ktp di Dusun Berembeng Barat Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, *6*(1), 77–86.

Ilhami, M. W. (2024). *Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif*. *10*(9), 167–186.

Irrubai, M. L., Affandi, I., & Supriatna, N. (2017). Kearifan Lokal Awik-Awik Desa Sesaot dalam Perspektif Hukum Islam. *Istinbath: Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam*, *16*(2), 390–418.

Iskandar, B., & Hamdani, A. U. (2017). Jasa Pengiriman Barang Studi Kasus : PT. XYZ. *Semnasteknomedia Online*, *5*(1), 67–72.

Kamaruddin, K. (2013). Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *21*(1), 39–70.

ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141
https://doi.org/10.37630/jpi.v15i4.3575

Kurniatama, A. (2019). *Nilai Feminisme Novel Isinga Karya Dorothea Rosa Herliany dan Novel Namaku Teweraut Karya Ani Sekarningsih Serta Relevansinya dengan Pembelajaran Sastra Di Sma*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Maharani, S., & Bernard, M. (2018). *Analisis_Hubungan_Resiliensi_Matematik_T*. *1*(5), 819–826.

Murtani, A. (2019). *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2019 SINDIMAS 2019 STMIK Pontianak Sosialisasi Gerakan Menabung*. *29*.

Nurdianti, S. R. (2014). Analisis faktor-faktor hambatan komunikasi dalam sosialisasi program keluarga berencana pada masyarakat. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, *2*(2), 149.

Prabowo, A., & Heriyanto. (2013). Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) Oleh Pemustaka di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, *2*(2), 1–9.

Pratiwi, Y. E., & Sunarso, S. (2018). Peranan Musyawarah Mufakat (Bubalah) Dalam Membentuk Iklim Akademik Positif Di Prodi Ppkn Fkip Unila. *Sosiohumaniora*, *20*(3), 199.

Putra, I. B. S. (2018). Sosial Control : Sifat Dan Sanksi Sebagai Sarana. *Vyavahara Duta*, *13*(1), 27–32.

Putri, A. P., Rahhayu, R. S., Suswandari, M., & Ningsih, P. A. R. (2021). Strategi Pembelajaran Melalui Daring Dan Luring Selama Pandemi Covid-19 Di Sd Negeri Sugihan 03 Bendosari. *Prima Magistra: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, *2*(1), 1–8.

Rejeki, Adnan, M. F., & Siregar, P. S. (2020). Jurnal basicedu. Jurnal Basicedu,. *Jurnal Basicedu*, *5*(5), 3(2), 524–532.

Siregar, F, A. (2018). Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya. *Jurnal Al-Maqasid*, *4*(2), 1–14. f

sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (Ke 2). Alfabeta.

Suriani, N., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Defenisi Populasi. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, *1*(2), 24–36.

Yusuf, M. A. (2022). Efektivitas Pembentukan Awik-Awik Gubuk Dalam Pencegahan Perzinaan Di Desa Peresak Batukliang Lombok Tengah. Universitas Islam Negeri Mataram.

Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum. *Jurnal Usm Law Review*, *5*(1), 110–127.

Bupu, E. M., Hedewata, A., & Mauritsius, D. (2023). Pemberian Sanksi Dalam Perceraian Adat di Desa Inerie, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, *3*(02), 476–485.

Diras, M. H., & Faisal. (2024). Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pengadilan Adat di Kota Lhokseumawe Diras [1] , Muhammad Hatta [2] & Faisal [3]. *CENDIKIA: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, *2*(3), 688–701.

Fitriani, F., Sumardi, L., Kurniawansyah, E., & Sawaludin, S. (2024). Ethnocivic: Eksplorasi Potensi Kearifan Lokal Sasak Sebagai Sumber Belajar PPKn SMA Kelas XI dalam Upaya Penguatan Karakter Peserta Didik. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, *9*(2), 794–801.

Gagah, D., & Sopiati, P. (2024). Pengumpulan Data Penelitian. *Metode Pengumpulan Data Penelitian*, *3*(5), 5423–5443.

Gantara, F., & Anshori, A. R. (2022). Analisis Upah Amil Zakat di BAZNAS Kota Bandung menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, *13*, 99–104.

Hamzani, D. A. I., & Mukhidin, D. (2022). Urgensi Percepatan Pembangunan Hukum Nasional. In *Educacao e Sociedade* (Cetakan ke, Vol. 1, Issue 1). PT Nasya Expanding Management.

Hisyam, D. hj. J. (2021). *perilaku menyimpang tinjauan sosiologis*. PT Bumi Aksara.

ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141
https://doi.org/10.37630/jpi.v15i4.3575

Hudori, A., Dahlan, D., & Haslan, M. M. (2019). Kesadaran Hukum Masyarkat Terhadap Kepemilikan E-Ktp Di Dusun Berembeng Barat Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, *6*(1), 77–86.

Ilhami, M. W. (2024). *Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif*. *10*(9), 167–186.

Irrubai, M. L., Affandi, I., & Supriatna, N. (2017). Kearifan Lokal Awik-Awik Desa Sesaot Dalam Perspektif Hukum Islam. *Istinbath: Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam ISSN*, *16*(2), 390–418.

Iskandar, B., & Hamdani, A. U. (2017). Jasa Pengiriman Barang Studi Kasus : PT. XYZ. *Semnasteknomedia Online*, *5*(1), 67–72.

Kamaruddin, K. (2013). Model Penyelesaian Konflik Di Lembaga Adat. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *21*(1), 39–70.

Kurniatama, A. (2019). Nilai Feminisme Novel Isinga Karya Dorothea Rosa Herliany Dan Novel Namaku Teweraut Karya Ani Sekarningsih Serta Relevansinya Dengan Pembelajaran Sastra Di Sma. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Maharani, S., & Bernard, M. (2018). *Analisis_Hubungan_Resiliensi_Matematik_T*. *1*(5), 819–826.

Murtani, A. (2019). *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2019 SINDIMAS 2019 STMIK Pontianak Sosialisasi Gerakan Menabung*. *29*.

Nurdianti, S. R. (2014). Analisis faktor-faktor hambatan komunikasi dalam sosialisasi program keluarga berencana pada masyarakat. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, *2*(2), 149.

Prabowo, A., & Heriyanto. (2013). Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) Oleh Pemustaka di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, *2*(2), 1–9.

Pratiwi, Y. E., & Sunarso, S. (2018). Peranan Musyawarah Mufakat (Bubalah) Dalam Membentuk Iklim Akademik Positif Di Prodi Ppkn Fkip Unila. *Sosiohumaniora*, *20*(3), 199.

Putra, I. B. S. (2018). Sosial Control : Sifat Dan Sanksi Sebagai Sarana. *Vyavahara Duta*, *13*(1), 27–32.

Putri, A. P., Rahhayu, R. S., Suswandari, M., & Ningsih, P. A. R. (2021). Strategi Pembelajaran Melalui Daring Dan Luring Selama Pandemi Covid-19 Di Sd Negeri Sugihan 03 Bendosari. *Prima Magistra: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, *2*(1), 1–8.

Rejeki, Adnan, M. F., & Siregar, P. S. (2020). Jurnal basicedu. Jurnal Basicedu,. *Jurnal Basicedu*, *5*(5), 3(2), 524–532.

Siregar, F, A. (2018). Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya. *Jurnal Al-Maqasid*, *4*(2), 1–14. file:///C:/Users/HP/Downloads/Hukum adat 2.pdf

sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (Ke 2). Alfabeta.

Suriani, N., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Defenisi Populasi. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, *1*(2), 24–36.